

BAB III

PERAN TURKI DALAM PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH PASCA KEMENANGAN AKP

Di bab III penulis akan mengelaborasi peran-peran Turki di Timur Tengah setelah AKP berkuasa. Kebijakan Turki yang sekarang mulai condong kepada negara-negara Timur Tengah membuat Turki semakin berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di sana. Turki tidak lagi menjadi alat pelaksana kepentingan Barat, namun langsung menjadi agen perdamaian. Hal ini terbukti dengan penolakan Turki ketika Amerika Serikat hendak mendirikan pangkalan militer di Turki untuk menyerang Irak tahun 2003. Selain itu, Turki juga menjadi mediator dalam konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, antara lain konflik Hamas-Fatah dan Israel-Syria.

A. Hubungan Turki-Timur Tengah pada Masa AKP secara Umum

Dewasa ini, sangat penting bagi Turki untuk mengokohkan posisinya lebih jauh di kawasan Timur Tengah. Posisinya harus dibangun atas 4 prinsip utama. Yang pertama adalah keamanan untuk setiap orang, tidak hanya untuk grup ini atau grup itu, Negara ini atau Negara itu, tapi keamanan umum untuk seluruh kawasan. Kedua, prioritas harus diberikan untuk berdialog mencari solusi atas krisis yang terjadi. Di sini peran Turki sebagai fasilitator telah terbangun dengan baik. Kemudian, mengapa Perdana Menteri, Presiden, serta Menteri Luar Negeri Turki terus menerus mengunjungi Timur Tengah? Karena mereka adalah satu-satunya pemimpin yang bisa berhubungan dengan seluruh pimpinan Timur Tengah. Jikalau saja sebelumnya tidak ada hubungan diplomatik

mereka tidak bertemu, maka kemungkinannya kecil sekali untuk membangun tatanan di Timur Tengah. Akankah mungkin membangun tatanan di Eropa jika Perancis dan Inggris tidak mempunyai hubungan apapun? Dalam kasus seperti itu, Negara seperti Jerman atau Negara aktor ketiga lainnya tidak akan campur tangan dan mengadakan jalur untuk dialog politik, sebagaimana yang Turki telah lakukan secara berkelanjutan di Timur Tengah. Turki telah mengambil alih banyak peran positif di antara Negara-negara Timur Tengah dalam tahun-tahun ini, sebagian telah terlihat di hadapan publik, dan sebagian masih belum terlihat. Negara-negara tersebut telah menemukan setiap kepercayaan dalam diri Turki. Sekarang, Turki dan tujuan diplomatiknya telah terbukti menjadi jalur yang terkuat dan paling nyata, tidak hanya di antara Negara-negara, namun juga di antara komunitas-komunitas dan aktor-aktor non-negara. Semua partai mengakuinya. Ketika sebuah pesan atau tujuan harus dikirim dari satu tempat ke tempat lain, jalur Turki lah yang digunakan.

Prinsip ketiga adalah ketergantungan ekonomi. Tatanan di Timur Tengah tidak bisa diraih di lingkungan yang ekonominya terisolasi. Hal ini terbukti jelas pada kasus Irak, Suriah, dan yang lainnya. Prinsip keempat adalah keberadaan budaya dan keberagaman sejarah, tidak ada satupun dari kota-kota di Timur Tengah yang terdiri dari atnis dan unsur sekte yang homogen. Baik Basra, Damskus, Istanbul, ataupun Kirkuk bukanlah kota yang homogen. Maka dari itu, untuk bisa membangun tatanan di timur Tengah, sangat penting untuk mempertahankan komposisi ini dengan berbagai macam cara.²⁴

²⁴ Ahmet Davutoglu. Turkey's Foreign Policy: An Assessment of 2007. (Ankara: Insight Turkey, 2008). Hal. 84-85.

Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan politik luar negeri Turki terutama di kawasan Arab-Islam mengalami berbagai perubahan signifikan sejak naiknya Partai Keadilan dan Pembangunan ke puncak kekuasaan di Turki dan sebelumnya dipengaruhi oleh dua tragedi luar biasa, yaitu serangan 11 September 2001 dan invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003. Di samping sikap Uni Eropa yang menghambat masalah penggabungan Turki ke Uni Eropa. Peristiwa-peristiwa ini membantu terpulihkannya kerangka luar negeri Turki yang lebih terbuka terbuka terhadap kawasan Arab-Islam melalui peran aktif dalam perdamaian Arab-Israel, baik yang berkaitan dengan Syria maupun Palestina, mewujudkan perdamaian nasional di Lebanon dan Palestina, dan membangun kerjasama dengan sejumlah negara Teluk guna meredam atau mengatasi dampak negatif dari invasi Amerika Serikat ke Irak yang sangat mempengaruhi kawasan tersebut terutama bagian yang dikuasai Kurdi.

Dalam masalah tersebut, Turki tidak berharap menghidupkan kembali kekhalifahan Islam Utsmani, tidak memulai perang dengan Barat, berkonflik dengan Cina, ataupun menjajah Eropa Timur. Memang benar bahwa sekarang ini Turki mengadopsi semboyan, "Al-Utsmaniah Al-Jadidah (Utsmani Baru)", akan tetapi Menteri Luar Negeri Turki dan penasihat politik luar negerinya Ahmet Davutoglu menegaskan berulang kali penolakannya terhadap ungkapan-ungkapan tersebut, jika dimaksudkan bahwa Ankara bertekad menyambung kembali peran yang pernah dimainkan imperium Istanbul (maksudnya, kesultanan Utsmani).

Yang dikehendaki Turki adalah memainkan peran Al-Quwwah Al-

ekonominya di dunia (keenam di Eropa), terminal penghubung di Benua Euroasia, dan jembatan penghubung antara 2 peradaban Islam dan Barat. Dan yang terpenting adalah Turki sebagai model percontohan baru dan ideal, yang menjadi teman menyenangkan bagi Islam, liberalisme, dan sekularisme.

Prinsip-prinsip utama pendekatan Ahmet Davutoglu yang baru adalah apa yang dinamakan Siyash Al-La Musykilah (politik Tanpa Masalah) dengan negara-negara tetangga. Arah dan kebijakan politik ini sangat berkontradiksi dengan yang terjadi pada tahun sembilan puluhan. Tepatnya ketika Ankara membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangganya dengan bara api.

Di samping itu, pada masa lalu Turki berupaya menjamin keselamatan wilayah kekuasaannya melalui pengembangan pertahanan militer melawan berbagai bahaya yang mengancam di sekitar wilayah tersebut. Akan tetapi bersamaan dengan kebijakan politik yang diterapkan Partai Keadilan dan Pembangunan, Turki menyadari bahwa negara-negara yang menjalankan kekuasaannya di perbatasan menggunakan soft power lah yang akan mampu menjaga dan melindungi wilayahnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahmed Davutoglu dalam Al-'Amq Al-Istiratiji (Strategi Intensif).²⁵

Meskipun adanya berbagai faktor beragam yang mempengaruhi sikap dan kebijakan negara-negara Arab yang terbagi dalam dua kubu militer,

dan antara mereka yang terbagi dalam dua kubu militer,

bahwa peran regional Turki bukanlah permasalahan Turki semata, melainkan berpengaruh kuat juga terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut.

Berdasarkan kenyataan ini, peningkatan kepentingan negara-negara Arab dan penguatan peran negara-negara di kawasan tersebut tergantung pada reformasi mendasar kondisi dalam negeri dan regionalnya untuk memahami strategi pemerintah Turki yang baru dan berinteraksi dengannya berdasarkan sebuah prinsip kepentingan bersama.

Kebijakan politik dunia Arab yang selama ini hingga sekarang memarginalkan Turki berpengaruh besar terhadap peran dunia Arab dalam mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Turki. Sebagian besar investasi negara-negara Arab yang mencapai nilai fantastis ditanamkan di luar kawasan ini. Bahkan impor Arab yang terus meningkat baik dari segi komoditi maupun jasa pelayanan melupakan Turki yang hanya menikmati saja darinya.

Hal itu bukan berarti bahwa berbagai persoalan yang menggantung antara Negara-negara Arab dan Turki, baik dalam permasalahan air ataupun perbatasan Negara, akan mendapatkan solusinya secara otomatis. Akan tetapi menempatkan hubungan Arab-Turki yang didasarkan pada kepentingan bersama tentunya berpengaruh pada kebijakan-kebijakan politik luar negeri Turki terhadap kepentingan Negara-negara Arab tersebut. Mayoritas interaksi negara-negara Arab dan sikap mereka terhadap peran regional Turki dapat dilukiskan dengan sebuah ungkapan singkat sebagai berikut, "Turki kembali untuk memimpin lagi."²⁶

²⁶ibid .hal. 369-371.

Turki yang sebelumnya menjadi halangan dalam hubungan Timur Tengah dan Barat kini justru memainkan peran katalis bagi kedua belah pihak. Turki berambisi menjadi aktor utama dalam melakukan transformasi demokrasi di Timur Tengah. Untuk itu, Turki berupaya membangun kepercayaan politik Negara-negara di kawasan Timur Tengah. Bagaimanapun juga, jejak Turki sebagai sekutu tradisional Barat telah mengundang kecurigaan jika Turki hanya menjadi kepanjangan kepentingan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Turki dalam pemerintahan Erdogan bekerja keras membangun kepercayaan politik mereka melalui penguatan ikatan kultural dan keagamaan dalam kebijakan politik luar negerinya.²⁷

Kendati tidak mudah bagi Turki menjalankan diplomasi dua muka, berbaikan dengan Suriah dan Iran tanpa mengundang kemarahan AS, namun bagaimanapun juga perilaku diplomasi Turki merefleksikan jalan sukses dalam memitigasi konflik dan mendorong demokratisasi di Timur Tengah. Proyek inisiatif demokrasi AS dalam GMEI (Greater Middle East Initiatives) tidak akan berhasil tanpa peran mediasi Turki. Turki sepenuhnya mendukung proyek tersebut dengan beberapa catatan penting bahwa demokratisasi di Timur Tengah tidak atas paksaan dan memperhatikan aspek cultural kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini pula, Washington mau tidak mau harus bekerja dalam framework posisi Turki yang unik. Turki memiliki potensi dan sekaligus kesempatan yang unik dalam proses demokratisasi di kawasan ini. Peluang dan potensi Turki ini dipandang berkontribusi menciptakan kawasan Timur Tengah yang lebih stabil.

Terdapat beberapa faktor yang membuat Turki sebagai mediator bagi kerangka stabilitas kawasan

Timur Tengah, dan di sisi lain penjembatan kepentingan Barat bagi hubungan yang lebih positif dengan Timur Tengah. Ke depannya, kepentingan strategis (strategic interest) AS dan Barat pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari peran mediasi Turki, termasuk dalam upaya AS mencegah ambisi nuklir Iran dan mendukung proses demokratisasi Timur Tengah pasca-Revolusi Muslim Sunni.²⁸

Jika demikian, bagaimana pihak Arab, baik resmi maupun tidak resmi menyikapi dan berinteraksi dengan kebijakan politik luar negeri Turki yang baru ini?

Pertama: yang terpenting adalah mengetahui bahwa prinsip-prinsip utama kebijakan politik luar negeri Turki tradisional tidak akan berubah secara frontal dan bahkan meskipun jika melihat kebijakan mereka tahun 60-an, tidaklah mengalami perubahan total dan mendasar. Kebijakan politik luar negeri Turki pada dasarnya adalah sekedar reorientasi belaka atau re-adjustment dan bukan perubahan mendasar yang terlepas dari kebijakan sebelumnya sama sekali. Sebab Turki tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dan kerjasamanya dengan Negara Zionis, tidak akan keluar dari NATO, dan tidak akan mengubah ambisinya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Kedua: Berbagai kekhawatiran yang ditimbulkan kebijakan politik luar negeri yang akhir-akhir ini semakin aktif di beberapa kawasan nasionalisme Arab ataupun area-area resmi sifatnya berlebihan. Kebijakan politik pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan tidak mengagendakan politik untuk menguasai Negara lain; Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan ini tidak

mempunyai ideologi tertentu untuk dipaksakan kepada pihak lain, tidak memiliki motif kesukuan atau rasis. Yang diharapkan dari kebijakan politiknya adalah memperkuat kepentingan Turki di kawasan regional dan memenuhi kekosongan kebijakan politik yang selama ini diarahkan ke Barat.

Ketiga: Strategi untuk mendukung dan memperkuat atau memperbesar keuntungan bangsa-bangsa Arab dari kebijakan politik luar negeri Turki yang baru adalah pertemuannya di pertengahan jalan. Maksudnya, memandang kebijakan politik ini sebagai sebuah kesempatan bersejarah dan bukan bahaya yang mengancam. Arah kebijakan-kebijakan Turki untuk membangun kerjasama ekonomi dan perdagangan harus diimbangi dengan kebijakan yang sama. Promosi pariwisata Turki dengan tetangga Arabnya haruslah diimbangi dengan promosi wisata Arab. Di samping itu, harus ada inovasi-inovasi baru dalam berbagai bidang kerjasama militer, pendidikan, dan teknik. Ketika sendi-sendi hubungan dan kerjasama Turki dengan tetangga Arabnya semakin kokoh, maka Turki akan menjadi sebuah Negara dan bangsa yang lebih sensitif terhadap gangguan yang mengancam hubungan ini berpengaruh negative terhadapnya.

Keempat: Negara-negara Arab hendaknya menghindarkan diri dari pandangan buruk terhadap Turki dari sudut pandang juru bicara Arab. Kebijakan politik Turki yang terbuka luas ke negara-negara Arab, mulai dari teluk hingga ke Afrika Utara, menunjukkan dengan jelas bahwa Ankara tidak ingin dan tidak berambisi untuk memanfaatkan politik semacam itu. Kesepakatan dengan Turki ataupun perbedaannya dengan Mesir atau Suriah atau Arab Saudi, baik dalam

masalah ini ataupun itu, haruslah dipandang dari sudut permasalahan tersebut dan

bukan dari sudut pandang monopoli politik. Strategi paling ideal tentunya adalah membebaskan bangsa Arab dan politik yang mendikte atau mendebat dan berinteraksi dengan Negara-negara tetangga, sekutu, dan koalisi dengan strategi perstuan Arab.

Kelima: Adanya kelompok nasionalisme dan sekularisme di Turki dan di tengah-tengah pemerintahan yang berkuasa tidak lebih takut dibandingkan hubungan tetangga Arab dengan sahabat Arabnya itu (Turki dan Arab). Kelompok nasionalisme dan sekularisme ini merasa khawatir terhadap tumbuh suburnya komunitas Arab-Islam di Turki yang tentunya akan memarginalkan identitas nasional Turki dan menghancurkan warisan republic. Untuk meredam ketakutan dan kekhawatiran ini, bangsa Arab baik di tingkat pemerintahan maupun rakyatnya hendaknya tidak membatasi hubungan mereka dengan Turki hanya kepada para pejabat-pejabat Partai Keadilan dan Pembangunan dan para pendukungnya, melainkan juga membuka diri terhadap semua kekuatan dan kelompok lain.²⁹

B. Perbaikan Hubungan Turki dengan Irak, Mesir dan Syria

Sudah kita ketahui bahwa sejak berdirinya negara Turki Modern, hubungan Turki dengan negara tetangga khususnya di Timur Tengah mengalami fase-fase yang sangat buruk. Dengan adanya masalah Hatay dan Mosul menjadikan Turki selalu berkonflik dengan Irak dan Syria. Namun ternyata setelah AKP berkuasa di Turki, kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah mulai mengarah ke hubungan yang lebih baik.

²⁹ Sunrif Teghan, Op. cit. hal. 369-373

Penolakan Turki memberikan fasilitas dan kerjasama yang diminta Washington untuk menginvasi Irak tahun 2003 merupakan keputusan yang tidak hanya berani, melainkan juga “As-Sa’ah Al-Haqiqah” (keputusan yang tepat) mengenai dimulainya kebijakan-kebijakan baru Politik Luar Negeri Turki di bawah pemerintahan Erdogan. Meskipun banyak kritikan yang dilontarkan terhadap pengambilan kebijakan ini di parlemen pada awal Maret tahun 2003, akan tetapi pada akhirnya terlihat kebenarannya. Dan inilah sikap pemerintahan Turki ketika itu terhadap permasalahan Irak.

Kebijakan tersebut menggembirakan mayoritas rakyat Turki karena menghindarkan negara ini dari keterlibatannya dalam komitmen militer yang dikhawatirkan membuka kembali memori dan luka lama kolektif dan berbagai kekacauan selama beberapa tahun terakhir sejak runtuhnya Imperium Utsmani. Di samping itu, keberadaan kekuatan militer dalam waktu lama di Irak Utara akan meningkatkan konflik antara warga Kurdi dengan militer Turki di sepanjang perbatasan.

Pengesahan dan persetujuan itu dilakukan pada permulaan Maret tahun 2003 yang akhirnya menolak kerjasama dengan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak yang harus dibayar mahal dengan terganggunya hubungan kerjasama antara Turki dengan Amerika Serikat yang semakin menurun hingga mencapai level terendah sejak embargo senjata Amerika Serikat sejak tahun 1975. Bagi para pejabat pemerintahan Bush, mereka melihat Turki sebagai sekutu kuatnya dan merasa sangat kecewa dengan keputusan tersebut hingga pejabat pemerintahan Amerika Serikat seperti wakil menteri pertahanan ketika itu Paul

dalam invasi Irak pada pemerintahan Presiden Torghout Ozal tahun 1990 di tengah-tengah propaganda serangan yang menargetkan Lembaga Militer Turki. Pada saat yang sama, masih ada kepentingan yang menghubungkan antara Turki dengan Amerika Serikat sebagai dua negara yang bersekutu, terutama melalui keanggotaan bersama mereka di Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Hubungan khusus itulah yang telah berakhir sebagai korban perang untuk menggulingkan rezim di Irak. Sehingga dapat dikatakan bahwa daya tarik hubungan Amerika Serikat-Turki telah berakhir.

Di samping itu, semua strategi keamanan yang dirahkan kepada Irak juga gugur akibat penolakan Turki tersebut. Sehingga datangnya ancaman bahaya yang berkaitan dengan masa depan Kurdistan Irak yang tergantung pada sebuah asumsi bahwa perkembangan politik di Irak Utara menimbulkan dampak langsung dan signifikan terhadap pemerintah Turki. Misalnya, penolakan bentuk pemerintahan Irak seperti pemerintahan federal tidaklah berarti sama sekali ketika Angkatan Bersenjata Turki tidak berada di wilayah Irak.

Hubungan ekonomi antara Turki dan Irak pun semakin meningkat. Menyebutkan 1 contoh saja, tanpa mengungkit ketegangan politik antara keduanya dewasa ini, Turki telah menjadi partner perdagangan Irak yang terbesar. Pada tahun 2009, Turki dan Irak menandatangani MoU dalam bidang-bidang yang berbeda, supaya mempererat hubungan ekonomi bilateral dan

perdagangan Turki dengan Irak telah jauh meningkat dari 2,8 milyar dollar pada 2007, manjadi 8,3 milyar dollar pada 2011.³⁰

Dari sisi historis, Irak merupakan salah satu daerah terpenting dalam hubungan internasional Turki selama perang dingin berlangsung, di mana setengah dari perdagangan luar negeri Turki dengan Dunia Arab sebelum tahun 1990 dilakukan dengan Irak. Kerjasama perminyakan yang terpenting bagi Turki adalah dengan Irak, terutama melalui pipa minyak yang melintasi Kirkuk-Yumur Talek di sepanjang laut Mediterania.

Irak merupakan kawasan yang lebih bebas bagi pemerintah Turki untuk melancarkan serangan terhadap para pemberontak Partai Pekerja Kurdistan dengan bekerjasama dengan mantan rezim pemerintahan Irak Saddam Hussein. Ketika Sadam Hussein dipukul mundur setelah perang pembebasan Kuwait, maka Turki mempunyai pengaruh besar di Irak Utara.

Akan tetapi invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, bagaikan jerami yang menghancurkan punggung Turki dan mengikis habis hubungan Turki-Amerika Serikat. Sebab keengganan Turki untuk bersama-sama menginvasi Irak menempatkannya di luar perhitungan pemerintahan Amerika Serikat yang tetap melanjutkan kebijakan politik dan militernya yang telah diagendakannya sendirian melanggar geografi Irak.

Dengan kebijakan politik Amerika Serikat ini, Turki tidak hanya keluar dari persamaan garis Irak saja, melainkan juga menyebabkan terganggunya

³⁰ Laura Batalla Adam, *Jurnal Turkish Policy*, 'Turkey's Foreign Policy in the AKP Era: Has There been A Shift in the Axis?' (Ankara: Turkish Policy Quarterly, 2012), Hal. 146

salah satu agenda berbahaya dan bahkan dikatakan hancur, yaitu bangkitnya eksistensi suku Kurdistan di Irak Utara yang masih berada dalam konteks federal. Akan tetapi ia telah memperlihatkan independensi realistik pemerintahannya dalam berbagai persoalan.

Waktu pun berlalu sebelum akhirnya muncullah semangat baru dan realita sikap dan kebijakan pemerintahan Turki terhadap Irak, tepatnya ketika realita krisis Irak memperlihatkan beberapa perkembangan baru. Perkembangan ini diikuti dengan beberapa sikap dan kebijakan Turki yang beragam dan parsial bersamaan dengan berjalannya pembentukan sebuah strategi politik yang lebih banyak bertumpu pada faktor-faktor diplomatik dan ekonomi dibandingkan faktor-faktor politik, berdasarkan kekuatan yang lebih lembut dibandingkan kekuatan yang kaku dan keras.

Struktur politik ini bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

-Berdiplomasi dengan beberapa negara tetangga Irak yang semakin meluas hingga mencakup pemerintahan Irak sendiri. Hal itu dimaksudkan untuk memperbaiki pemerintahan yang stabil untuk menangani krisis Irak melalui Timur Tengah.

-Meninggalkan pendekatan "Keamanan" yang sempit terhadap Irak, yang bertumpu pada Kurdistan Irak dan masalah Kirkuk.

-Pendekatan politik yang lebih intensif terhadap Irak berdasarkan keseimbangan strategis.

-Memperluas hubungan baik dengan beberapa pejabat Irak untuk merangkul para pemain yang lain seperti partai-partai Kurdistan.

-Sedikit menghindar dari politik yang bersentuhan dengan persoalan etnis Turkuman Irak, terutama setelah jelas bahwa nasionalisme mereka akan menggerakkan mereka dan fokus pengecualian pada garis depan Turkuman di Irak tidak pada tempatnya sama sekali.

-Pendekatan tugas dan fungsional lebih banyak terhadap persoalan-persoalan Irak yang mampu memperkuat hubungan perdagangan dan jaminan pelayanan.

-Pendekatan yang lebih elastis terhadap kebijakan-kebijakan politik Irak dan realistis, dan pengokohan struktur konstitusi dan hasilnya adalah kesiapan Ankara menerima konstitusi federal Irak.

-Hanya saja bisa dikatakan bahwa keputusan yang diambil pada permulaan Maret tahun 2003 merupakan "Detik-detik Pembentukan" kebijakan politik luar negeri Turki, yang memiliki beberapa implikasi baik dalam negeri Irak, di tingkat regional maupun internasional.

Dari sudut pandang Amerika Serikat, krisis kepercayaan dengan Turki masih terus berlanjut dan akibatnya tidak akan pernah berakhir kecuali berakhirnya krisis Irak. Adapun dari sudut pandang Timur Tengah, maka Turki telah menentukan strategi baru yang bertumpu pada kebijakan lama yang dibangun berdasarkan pada prinsip pertahanan dan perlawanan terhadap pasukan asing yang memasuki wilayah-wilayahnya berdasarkan pada prinsip-prinsip

yang tidak ditentukan. Terutama jika pasukan militer ini berasal dari negara-

negara besar. Menjaga dan melindungi haknya merupakan dinding pemisah yang strategis dan menyeluruh dengan beberapa persoalan regional tertentu terutama jika berkaitan dengan Timur Tengah.

Selama beberapa tahun setelah invasi tersebut, Irak menjadi salah satu persoalan politik luar negeri Turki dan dalam sebuah kebijakan yang tidak memiliki alur yang jelas. Dalam hal ini, Turki setuju untuk mengirimkan pasukannya di Irak, terutama di wilayah-wilayah Arab-Sunni. Akan tetapi penolakan dari kelompok perlawanan dan juga kekuatan nasionalisme Kurdi menggagalkan kebijakan ini. Ketika kelompok perlawanan semakin meningkat di Irak, maka perdana menteri Turki mengkritik kebiadaban militer Amerika Serikat di Falujah. Pada saat yang sama nampak jelas bahwa militer Amerika Serikat dan Irak menutup mata tentang adanya kelompok-kelompok Partai Pekerja Kurdistan Turki di Irak Utara.

Akan tetapi tujuan utama Turki sejak mengkristalnya sistem pemerintahan Irak yang baru adalah memperkuat kondisi kaum sunni Arab, menjaga kesatuan Irak dan mencegah perpecahan, membatasi dan mengurangi kekuatan yang dimiliki suku Kurdistan termasuk menghentikan upaya suku Kirkuk. Untuk merealisasikan tujuan ini, maka pemerintah Turki membuka jalur-jalur perhubungan dan informatika yang lebih luas dengan kelompok-kelompok dan para pemimpin Arab Sunni dan Syi'ah, termasuk kelompok perlawanan. Turki pun menjadi salah satu anggota yang berperan dan terlibat dalam berbagai pertemuan yang diadakan negara-negara tetangga Irak.³¹

Pemerintah Turki senantiasa berusaha menjaga kejernihan hubungan Turki-Irak. Ankara juga menegaskan untuk mendapatkan kepercayaan Kairo dan mendorong hubungan yang lebih erat dengannya dalam kondisi apapun, serta meyakinkannya bahwa kembalinya Turki ke Timur Tengah tidak akan merugikan siapapun, terutama peran Mesir dalam proses perdamaian dan mediasi antara Hamas dan Pemerintah Palestina dari satu segi dan dengan Israel dan Amerika Serikat dari segi yang lain.

Meskipun sebagian pengamat menyatakan terjadi persetujuan dan perebutan pengaruh tentang peran Turki dalam proses tersebut, terutama setelah melihat sikap dan kebijakan politik Perdana Menteri Recep Tayyep Erdogan yang tegas dan kuat, dan bahkan keras terhadap kebrutalan Israel terhadap jalur Gaza hingga terjadinya serangan terhadap kapal kebebasan tanggal 31 Mei 2001 yang menimbulkan reaksi luar biasa dari dunia Arab dan Islam baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakatnya. Sikap Mesir yang tidak berani membuka gerbangnya menuju Rafah, tentunya sangat makin menyulitkan embargo yang dialami rakyat Jalur Gaza, namun kenyataan pada akhirnya membuktikan bahwa hubungan kedua negara Turki-Mesir, memperlihatkan performa terbaiknya sejak beberapa tahun sebelumnya.

Belum pernah terjadi sebelumnya jika kedua negara saling meningkatkan kunjungan masing-masing selama tiga tahun terakhir (dalam rata-rata kunjungan per tahun, di mana Presiden Mesir Muhammad Husni Mubarak mengunjungi Turki dua kali, ditambah dengan puluhan kali kunjungan kementerian Mesir ke Ankara, sebagaimana Presiden Turki Abdullah Gul berkunjung satu kali

dua kali dan kunjungan kementerian luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan juga industri beberapa kali).

Hubungan Turki-Mesir benar-benar memasuki fase barunya secara frontal. Meskipun politik luar negeri Mesir masih relatif stagnan, akan tetapi Turki baru mengembangkan jalinan hubungannya dengan Mesir, karena ingin menjaga kepercayaan Kairo dan meyakinkannya bahwa kembalinya Turki ke dunia Timur Tengah bukan demi kepentingan satu golongan dan merugikan golongan lain.

Pada saat yang sama, Mesir menyadari bahwa peran Turki dalam persoalan Palestina, perundingan perdamaian, berbagai upaya penyelesaian dalam negeri Palestina, dan mediasi antara gerakan perlawanan Islam atau Hamas, tidak lain merupakan dukungannya dan juga dukungan terhadap upaya Kairo dalam strategi kebijakan luar negerinya untuk melawan pengaruh Iran yang semakin memperluas pengaruh politiknya dan mengisi kekosongan politik yang disebabkan bubarnya koalisi Arab Saudi, Mesir, dan Suriah.

Di samping sikap dan kebijakan utama itu, Kairo juga melihat bahwa di sana terdapat unsur-unsur kebersamaan lainnya dengan Turki seperti keinginan menjaga wilayah kedaulatan Irak dan persatuan berbagai koalisi Internasionalnya dengan Turki di bawah naungan Amerika Serikat. Mesir terlibat dalam dialog strategis dengan Turki dan mendorongnya untuk menjaga keseimbangan politik di kawasan tersebut. Sebab terjaganya keseimbangan dan kepentingan politik antara Kairo dengan Ankara yang berambisi mengimbangi

pengaruh Iran lebih efektif untuk membuka jalan diplomatik. Di samping itu

Kairo juga membaca indeks kesejarahan kawasan regional dengan sensitifitasnya, dan mendapatkan bahwa upaya mengadakan dialog strategis tahun 2008 sangatlah tepat dari segi waktunya. Dan perlu dicatat, Kairo tidak melakukan dialog-dialog strategi kecuali dengan Amerika Serikat.³² Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan Turki-Mesir yang sejak dulu tak pernah membaik, terutama setelah Gamal Abdul Nasser menghembuskan ideologi Nasserisme ke seluruh penjuru dunia Arab, pada masa kekuasaan AKP hubungan kedua negara mengalami progress ke arah yang lebih baik.

Pada permulaan abad lalu, Turki berada di ambang perang dengan Suriah. Setelah Erdogan menduduki puncak kekuasaan tahun 2002, ia menawarkan penyelesaian berbagai konflik kepada presiden Basyar al-Asad melalui berbagai perundingan dan diplomasi. Sekarang ini, hubungan kedua negara berubah menjadi sebuah model yang layak dicontoh, di mana kedua negara telah melebur dalam sebuah negara dan satu keluarga bersama (Suriah dan Turki, dan Turki adalah Suriah). Inilah sebgian ceramah yang disampaikan Erdogan di hadapan para peserta Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Turki-Arab ketiga yang diadakan di Istambul tanggal 10 juni 2010. Perdana Menteri Recep Tayyep Erdogan menjelaskan secara global tentang hubungan negaranya dengan Republik Suriah. Hubungan dan kerjasama tersebut untuk mendekatkan kedua negara yang berhasil mengatasi konflik antara keduanya menjadi sebuah persahabatan erat, yang selama ini tidak dikehendaki pemerintahan Amerika Serikat dan menimbulkan kegusaran sekutu lamanya, Israel. Di samping itu, kerjasama

mereka melihat bahwa dalam kedua negara tersebut tersimpan kekuatan regional yang tidak bisa dipandang remeh. Anehnya, hubungan ini berhasil mengubah seluruh keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut dan menggantinya secara total. Keduanya berhasil membersihkan beberapa racun konflik politik di kawasan tersebut.

Suriah dan Turki telah berubah dari musuh yang berkhianat dalam kamus keduanya menjadi teman setia hingga menjadi sebuah negara dan dan satu keluarga bersama (berdasarkan ungkapan Erdogan). Setelah sebelumnya Turki selalu mengancam akan menyerang Suriah karena mendukung Partai Pekerja Kurdistan yang ingin memisahkan diri. Maka militer Turki pun telah bergerak ke perbatasan Suriah untuk menyerang Damaskus pada tahun 1998. Ankara berhasil mengadakan perjanjian damai dan keamanan dengan Suriah yang dikenal dengan nama Ittifaqah Adana (Kesepakatan Adana), pada bulan Oktober tahun yang sama. Dan kedua negara itu pun berdamai hingga waktu yang lama.³³

C. Peran Turki dalam Mediasi konflik Israel-Syria dan Fatah-Hamas

Dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah, Turki telah melakukan banyak hal seperti menolak invasi asing terhadap Negara-negara di Timur Tengah atau menjadi mediator hubungan dalam konflik antar negara di Timur Tengah. Namun dalam sub bab ini, penulis hanya akan mengelaborasi peran Turki dalam memediasi konflik Israel-Syria serta konflik internal Palestina

Adapun sekarang, Turki memiliki kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik internasional, menengahi berbagai konflik di Balkan, Timur Tengah, Kaukasus, sehingga dengan begitu ia pun mampu mengubah Negara-negara yang dulunya bermusuhan seperti Rusia dan Syria menjadi teman dekat.

Davutoglu memainkan peran penting sebagai mediator rahasia dalam semua proses mediasi ini, termasuk menghentikan perang antara Rusia dengan Georgia, pembicaraan tidak langsung antara Syria dengan Israel tahun 2008, dan pendekatan Turki terhadap penduduk Kurdi di Irak dan Armenia. Semua keberhasilan ini selayaknya membuat Eropa menyadari kebutuhan terhadap kehadiran Turki untuk menstabilkan kawasan yang bergejolak, yang membentang mulai dari Timur Tengah hingga Balkan dan terus menuju Asia Tengah.³⁴

Tawaran yang disodorkan kepada Turki mengenai peran barunya di kawasan Timur Tengah mengharuskan diterapkannya sebuah prinsip bahwa kesamaan yang membentuk karakter hubungan antara sebuah pemerintahan setelah periode Islam dan Negara Kemalisme tidak akan menyebabkan kegoncangan dan instabilitas atau tidak konsisten dalam politik luar negeri, dan bahwasanya pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan yang mengendalikan urusan Negara selama beberapa lama (2002-2010) mendorong Turki menuju diplomatic yang aktif dan memiliki peran besar di Timur Tengah

³⁴ Syarif Taghian. op. cit hal. 295

dan Dunia Islam. Di mana kita dapat membahas tentang dinamika baru dalam politik Turki dan memperbandingkannya dengan era sebelumnya.³⁵

Turki telah menjalani berkali-kali peran sebagai mediator antara Syria dan Israel dan juga antara Syria dengan Iraq. Israel dan Syria telah mengadakan 5 putaran dialog tidak langsung di bawah mediasi Turki pada tahun 2008 tentang masa depan Israel menguasai Dataran tinggi Golan di perbatasan antara dua Negara (Seibert, 2010). Ini merupakan hasil dari politik luar negeri Turki tanpa musuh serta persahabatan dekatnya dengan Syria. Kedua Negara telah menjelaskan pendekatan yang sangat hati-hati dalam hubungan timbale balik mereka. Turki adalah Negara sekuler dengan hubungan yang sangat dekat dengan NATO, EU, USA dan Israel, yang telah berkurang kepercayaan satu sama lain dan telah berkontribusi untuk terjadinya keadaan hubungan yang bermasalah sebelumnya. Provinsi Turki yang sekarang disebut Sanjak Alexandretta telah lama menjadi wilayah yang diperebutkan. Hal ini kemudian diikuti dengan konflik-konflik sekitar penggunaan air dari Sungai eufrat dan dukungan Syria untuk PKK. Setelah memburuknya krisis di tahun 1998, beberapa perjanjian antara Syria dan Turki ditandatangani termasuk kerjasama untuk melawan PKK bersama. Rasa saling percaya telah dikuatkan dengan penolakan Turki untuk berpartisipasi pada invasi ke Iraq tahun 2003 dan hubungan-hubungan pun diproklamirkan setelah pembentukan era baru dalam hubungan tahun 2007 dengan dukungan untuk mengadakan area perdagangan bebas dan khususnya di tahun 2009 setelah penandatanganan Deklarasi Politik untuk pembangunan strategi level tinggi.

Tidak ada keraguan bahwa kemajuan ini menyumbangkan kebangkitan Turki di mata Syria dan lebih dari iklim persahabatan. Hal ini mendorong Turki untuk meraih kepercayaan sebanyak-banyaknya untuk menjadi fasilitator dalam dialog antara Syria dan Israel di tahun 2008. Namun pendekatan kembali dengan Negara-negara Arab dan perlawanan Turki terhadap kebijakan Israel membawa Turki untuk kehilangan kepercayaan diri setelahnya dan disebut-sebut mmengakhiri proses mediasi.³⁶

Sedangkan dalam konflik di Palestina, Sikap dan kebijakan Turki terus berkembang dan mengkristal dalam volume yang lebih besar. Tepatnya ketika Perdana Menteri Erdogan dari Istambul menyatakan bahwa negaranya siap memainkan peran aktif untuk mencapai perdamaian antara Fatah dan Hamas, dua kelompok besar di Palestina. Pernyataan Erdogan ini disampaikan setelah menanggapi permintaan yang disampaikan dua pihak yang berseberangan di Palestina, Hamas dan Fatah kepada pemerintah Turki untuk menjadi mediator dalam rekonsiliasi antara keduanya setelah Israel menyerang kapal Mavi Marmara.

Dalam keterangan persnya bersama presiden Basyar Al-Asad tanggal 7 Juni 2010, Erdogan menjelaskan permasalahan tersebut dengan mengatakan, “Sesungguhnya rekonsiliasi dari konflik antara Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan gerakan perlawanan Islam “HAMAS” yang

³⁶ R. Sulik. 2010. Mediation Capacity of Turkey as Regional power. <http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2012-04-ankara/Mediation-capacity-of-Turkey-as-a-regional-power-PhDr.-Rudolf-Sulik.pdf>

menguasai Gaza merupakan kewajiban. “Seraya menambahkan bahwa Hamas bersedia mengungkapkan harapannya jika Ankara bersedia menjadi mediatornya.

Dalam sambutannya, Erdogan menyatakan, “Perpecahan ini hendaklah tidak terus berlanjut dalam situasi dan kondisi semacam ini. Saya yakin bahwa kita dapat mewujudkan perdamaian.” Erdogan menambahkan, “Para pemimpin Hamas memberikan pelimpahan kewenangan kepada kami untuk memediasi masalah ini dan mereka juga ingin segera menyelesaikan permasalahan ini. “Ia juga menambahkan, “Kami juga ingin pendekatan yang sama dari Fatah dan kami akan mengadakan pertemuan dengan mereka sesegera mungkin.” Maksudnya, pertemuan dengan Mahmud Abbas yang mengunjungi Ankara pada tahun yang sama.

Apabila Erdogan berhasil meoloskan kebijakan dan strategi tersebut dengan hasil-hasil positif, maka akan menjadi keberhasilan baru dalam pemerintahan Turki yang karir politiknya semakin bersinar di Timur Tengah selama beberapa tahun terakhir dan memperoleh kepercayaan dan popularitas luar biasa dari dunia Arab dan Islam. Upaya dan keberhasilan juga akan menjadi pukulan telak bagi Mesir dengan statusnya sebagai Negara yang gagal menangani permasalahan yang berhasil dimainkan Turki dengan baik. Dengan begitu, maka ia telah mengambil peran utama yang selama ini dimainkan Mesir pada masa

BAB IV

ANALISIS PERAN AKP DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DI TIMUR TENGAH

.Di bab IV penulis akan menganalisis hal-hal yang menjadikan kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah berubah sejak tahun 2002. Penulis akan mengelaborasi peran AKP dalam perpolitikan domestik Turki sehingga bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki untuk berperan aktif dalam permasalahan di Timur Tengah.

Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatar belakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Namun, ini akan menjadi kesalahan jika kita menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri bertindak dalam suatu keadaan yang vacuum. Sebaliknya, setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari 3 kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luarr negeri Negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan Negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer Negara. Yang ketiga adalah konteks internasional posisi tertentu di mana Negara itu menemukan jati dirinyam khususnya mengenai hubungannya dengan Negara lain dalam suatu system. NAMun dalam bab ini, Penulis hanya akan mengelaborasi peran AKP dalam perpolitikan domestic Turki

Bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri Negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu. Faktor-faktor lain juga bisa bekerja di dalamnya. Kita bisa mencontohkan kepribadian pengambil keputusan atau struktur konsep internasional.

Keberhasilan AKP memenangkan pemilu di Turki dikatakan sebagai kemenangan demokrasi partai ini dengan tidak diragukan lagi, setelah sebelumnya diragukan identitas dan jati dirinya mengenai sekularismenya atau nasionalismenya dan mendapatkan berbagai ancaman dari militer, untuk menemui rakyatnya dan memperlihatkan kebijakan-kebijakan pemerintahannya, sehingga para pemilih Turki pun memberikan kepercayaan kepadanya. Itu merupakan kemenangan demokrasi dan juga Islam.

Keberhasilan itu juga membantah dengan tegas pendapat yang menyatakan adanya kontradiksi dengan demokrasi atau mereka yang mengaitkan Islam dengan kekerasan, baik dalam masalah keyakinan maupun pelaksanaan ibadah. Keberhasilan itu juga bantahan dan jawaban tegas atas ketakutan-ketakutan di kalangan umum akibat propaganda yang menyatakan bahwa Islam merupakan ancaman baru setelah runtuhnya komunis.

Pemerintahan yang dikembangkan oleh Turki adalah sekular demokratis modern yang dikendalikan oleh partai berkeyakinan Islam yang mampu

memisahkan antara agama dengan politik tanpa harus membela dan mempertahankan yang satu dengan mengalahkan yang lain.³⁸

Konstitusi Turki menunjukkan bahwa bentuk tatanan Negara Turki adalah Republik Demokratik Sekular. Adapun lembaga-lembaga konstitusi di Negara terbagi atas kekuasaan legislatif yang berupa parlemen, kemudian kekuasaan eksekutif yang berupa presiden dan dewan menteri, lalu kekuasaan yudikatif terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pengadilan pidana, pengadilan perdata dan pengadilan khusus. Sementara mahkamah konstitusi merupakan kekuasaan pengadilan yang tertinggi.

Jika kita melihat unsur-unsur tatanan politik luar negeri Turki yang didasarkan pada undang-undang tahun 1982 dari sisi teoritis, kita tidak akan menemukan adanya sesuatu yang membedakannya karena melihat ia adalah tatanan demokrasi terbatas. Dan pemegang kendali perpolitikan adalah tatanan demokrasi terbatas, dan landasan politiknya adalah sekularisme Attaturk yang dilindungi oleh militer.

Dampak dari keterbatasan tersebut adalah tidak nampak adanya perubahan yang mendasar pada kehidupan perpolitikan Turki yang terpancar pada kebijakan dalam negeri maupun luar negeri sampai pada saat gejolak politik memungkinkan untuk melahirkan beberapa celah, militer melakukan intervensi untuk

Semua pihak sekarang memperbincangkan tentang model Turki (The Turkish Model) yang berporos pada tiga pilar utama yaitu demokrasi, sekularisme, dan Islam.

Dapat kita katakan, rahasia perubahan tatanan politik Turki menjadi salah satu alat kekuatan yang lembut pada tingkat regional, yaitu:

- Merupakan model dari sikap kelompok Islamis di mana melalui tatanan tersebut mereka mampu berinteraksi dengan keadaan dalam negeri di Negara mereka dengan sikap yang realistis, pragmatis, dan moderat.
- Merupakan model demokrasi Islam yang moderat yang selama ini dicari oleh Amerika Serikat dan berupaya untuk menerapkannya secara luas.
- Merupakan model kemampuan identitas Islam untuk beradaptasi dan menghargai nilai penting di masyarakat yaitu kebebasan, keadilan, dan transparansi.³⁹

Dalam pengambilan keputusan model pluralist, terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan 'policy influencer'. Menurut D. Coplin, policy influencer system merupakan aktor politik domestic dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan policy influencers terjadi secara timbale balik. Di satu sisi pengambil keputusan membutuhkan policy influencers karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, policy influencers membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutannya diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan policy influencers tidak dipenuhi pengambil

keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan policy influencer kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

Coplin membedakan policy influencer menjadi 4 macam, yakni bureaucratic influencer, partisan influencer, interest influencer, dan mass influencer. Namun penulis di sini akan membahas secara mendalam mengenai partisan influencer.

A. Bureaucratic Influencer

Dalam hal ini, AKP telah membuat strategi yang sangat cerdas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri di Turki. 3 tokoh besar AKP, yakni Erdogan, Abdullah Gul, dan Ahmet Davutoglu menduduki posisi-posisi penting di cabinet pemerintahan, yakni menduduki posisi sebagai Perdana Menteri, Presiden, serta Menteri Luar Negeri.

Bahkan, dengan adanya pemilu presiden secara langsung yang diadakan pada tanggal 10 Agustus 2014 yang lalu, Erdogan sebagai pendiri AKP telah merencanakan untuk memberi kewenangan yang sangat luas kepada presiden agar bias berperan banyak dalam perpolitikan domestic maupun internasional.

Situs 24News merilis, AKP telah bersumpah untuk mengubah konstitusi

artinya Turki akan memiliki sistem presidensial yang mirip dengan Prancis, ketimbang demokrasi parlementer yang populer saat ini.⁴⁰

Kemudian dalam menghadapi militer, Erdogan sebagai tokoh dari AKP juga berhasil membuat militer takluk. Setidaknya ada 6 hal yang membuat militer tidak berani berkebutukan di hadapan AKP:

Pertama, Erdogan dengan jaringannya berhasil menciptakan hubungan baru dengan Barat secara umum, yang mendorong mereka menerima kehadirannya sebagai pengganti yang demokratis dari lembaga militer. Pada saat yang sama, Barat tentunya menarik dukungannya kepada pihak militer dan menghentikan provokasinya untuk mempermainkan kartu kudeta.

Kedua, Merupakan kesempatan langka bagi AKP untuk mencapai kesepakatan dengan kepala Lembaga Militer untuk mengurangi campur tangan mereka dalam panggung politik di Negara tersebut, sebagai respon terhadap kelompok Eropa sehingga berkenan mempelajari permintaan Turki untuk bergabung dengannya.

Ketiga, Terjadi perkembangan penting dengan berhasil diyakinkannya lembaga militer. Setelah bersikap sangat keras dalam mendekati Islam melalui lembaga Negara—sekarang mendekati—, maka komandan militer Turki Mehmet Ilker Basbug menegaskan pernyataan yang disampaikannya dalam sebuah pidato tahunan tanggal 19 April 2009, “Meskipun militer adalah penjaga sistem secular

Kemal Attaturk, maka hal ini bukan karena kebenciannya terhadap Islam, melainkan penggunaan agama sebagai kendaraan politik.

Keempat, AKP di bawah kepemimpinan Erdogan berhasil memanfaatkan semua piranti yang dilindungi konstitusi dan peraturan pemerintah terutama lembaga pengadilan dengan keterampilan manajemen dan kompetensi luar biasa tanpa melanggar konstitusi bagi ak konstusional anggota jaringan Ergenekon. Erdogan berhasil mematahkan rencana kudeta militer, membatasi mereka yang berinteraksi dengannya melalui legalitas konstitusi tanpa perlu menimbulkan goncangan dan gejolak berarti dalam dunia informatika dan jaringan media massa, dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan para terdakwa.

Kelima, Keberhasilan luar biasa yang dicapai AKP selama delapan tahun kepemimpinannya , baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri, yang menimbulkan nuansa baru dalam kehidupan warga Turki dan penghasilan mereka sehari-hari, mengantarkan Negara Turki dihormati di Dunia Arab dan Islam dan bahkan seluruh dunia,, maka semua itu merupakan cermin keberhasilan kbijakan yang diambil Erdogan dlam berbagai bidang, baik masalah genosida Israel terhadap rakyat Gaza, terbukanya hubungan internasional dan regional Turki semakin meluas, dan kemunculan Turki sebagai pemain terpenting dalam kawasan tersebut. Semua keberhasilan spektakuler itu merupakan dukungan besar bagi AKP dalam mmenghadapi kudeta militer.

Keenam, keberhasilan pemerintahan AKP dalam bidang ekonomi semakin

Turki secara bertahap dalam kurun waktu singkat, yaitu kurang dari 9 bulan.³ tahun sebelum AKP berhasil menduduki puncak kekuasaan, Turki mengalami krisis ekonomi luar biasa. Dengan keberhasilannya itu, AKP dianggap mampu mengangkat perekonomian tersebut yang tadinya harus terseok-seok dalam selokan dan terowongan yang gelap karena krisis ekonomi internasional yang melanda Negara-negara seluruh dunia selama dua tahun lalu, dengan kerugian atau dampak negative paling sedikit dibandingkan perekonomian Negara-negara Eropa dan dunia lainnya menuju kejayaannya.⁴¹

B. Partisan Influencer

Partisan influencer adalah kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan pada penguasa dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam sistem demokrasi.

Dalam memahami perilaku pengambilan keputusan politik luar negeri, kita tidak hanya perlu menelaah problema-problema intelektual yang dihadapi oleh para pengambil keputusan politik luar negeri serta factor-faktor psikologis yang mempengaruhinya, tapi juga perlu memahami dampak latar organisasional tempat mereka bekerja. Para pengambil keputusan politik luar negeri beroperasi menurut serangkaian peran yang terorganisasi. Mungkin saja dia seorang presiden, perdana menteri, atau kepala departemen luar negeri., atau mungkin pula dia seorang penasihat salah seorang pengambil keputusan tertinggi. Mungkin pula dia

menduduki posisi yang lebih rendah dalam birokrasi politik luar negeri, namun dia tetap dipengaruhi oleh struktur organisasional umum tempat dia bekerja, yaitu melalui arus komunikasi dan interaksi social dalam organisasi tersebut.⁴² Maka dari tu, pastinya sangat penting untuk mempelajari karakter-karakter serta ideology masing-masing partai yang ada dalam parlemen sehingga mempengaruhi kebijakan luar negerinya.

Selanjutnya, penulis akan mengelaborasi tentang peran AKP dalam mengarahkan kebijakan luar negeri Turki hingga bias condong ke Timur Tengah. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui lebih dulu partai-partai apa sajakan yang menduduki parlemen sejak keberadaan AKP dalam kancah perpolitikan Turki.⁴³

Party name	1999 elections	2002 elections	2007 elections	2011 elections
<u>AKP</u> - Justice and Development Party	59	360	341	327
<u>CHP</u> - Peoples Republican Party	3	190	99 (there were 112, but 13 members passed to <u>DSP</u>)	135
<u>MHP</u> - National Movement Party	124	0	70	53
<u>DSP</u> - Democratic Left Party	58	0	13 (there were none, but 13 members left <u>CHP</u> and passed to <u>DSP</u>)	0

⁴² William D. Coplin. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. (Bandung: Penerbit Winar Baru Algesindo, 2003). Hal. 54-55

⁴³ <http://www.allaboutturkey.com/parti.htm>

<u>ANAP</u> Motherland Party	-	71	0	0 (quit before elections)	0
<u>DYP</u> Path Party)	(True	81	0	0 (entered as DP)	0

Dari daftar di atas sudah diketahui bahwa sejak tahun 2002, AKP telah memenangkan pemilihan umum sebanyak 3 kali berturut-turut. 2 partai besar lain yang masih mampu bersaing dengan AKP adalah CHP (The Republican People's Party) dan MHP (National Action Party). Berikut ini akan penulis tampilkan profil dari masing-masing partai.



a. **CHP (The Republican People's Party)** didirikan pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal Attaturk, yang sekarang dipimpin oleh Mr. Kemal Kiricdaroglu. Partai ini menjadi partai sayap kiri yang kuat sejak bergabungnya partai ini dengan partai utama di sayap kiri, yakni SHP pada tahun Februari 1995. Penggabungan partai tersebut menyebabkan banyak mantan politisi SHP keluar dari CHP dan bergabung dengan DSP. Banyak yang menyalahkan para pendahulu agar tidak menjadi partai sayap kiri. Mr. Baykal, pemimpin CHP sampai Mei 2010, memang cenderung kepada kebijakan ekonomi liberal dan Custom Union pada umumnya. Setelah pemilihan umum tahun 1999, CHP-yang hanya memperoleh 8,7 % suara- menghilang dari parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mantan pemimpinnya, Mr. Baykal, dianggap bertanggung jawab atas kekalahan dan tidak terkontrolnya partai setelah adanya Kongres Besar Luar Biasa

CHP dan kemudian mengundurkan diri. Selama pemilu 2002, mantan pemimpin

Mr. Baykal mendapatkan kembali kursinya dan mereka mampu mendapatkan 19,39 % suara, kemudian menjadi posisi kedua di parlemen dan posisi pertama dalam oposisi. Pada pemilu 2007 mereka bergabung dengan DSP dan mendapatkan 20,88 % suara, membawa 112 kursi. Setelah pemilu, para anggota DSP meninggalkan partai dan kembali ke partai mereka dulu. Pada pemilu 2011 mereka mendapatkan 25,92 % suara dan menduduki 135 kursi di parlemen.



b. MHP (National Action Party) Partai ultra nasionalis (juga bisa disebut dengan Serigala Abu-abu, dari nama gerakan pemudanya). Didirikan pada tahun 1969 oleh almarhum Alpaslan Turkes. Dibentuk sebagai organisasi setengah militer, MHP mempunyai tanggung jawab yang besar dalam dalam kenaikan tingkat kekerasan di akhir era 70-an. MHP dibekukan oleh tentara setelah tahun 1980, karena Turkes dan petinggi lainnya dicurigai sebagai pembunuh dari beberapa tokoh penting pada awal tahun 80-an. Pada tahun 1995, Turkes diizinkan untuk membentuk kembali konstitusi MHP dan mengikuti pemilihan umum hingga mendapat 8,5 % suara. Pemakaman Turkes pada tahun 1997 diikuti oleh 300.000 orang termasuk para politisi dari semua partai. Turkes telah disukseskan dengan adanya Dr. Devlet Bahceh, meskipun dia berseberangan dengan partainya Tugrul Turkes, anak dari pendiri MHP. MHP menjadi partai terbesar ke-2 di Turki setelah pemilu tahun 1999 dan mendapatkan 129 kursi di parlemen. Pemimpin barunya, Bahceli, telah mengesankan profil yang berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya dan membawa garis baru dalam politik mereka yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selama pemilu tahun 2002,

Namun pada pemilu 2007 mereka mendapatkan 14,27 % suara dan menduduki 70 kursi dalam parlemen. Pada pemilu 2011 mereka mendapatkan 12,98 % suara dan menduduki 53 kursi di parlemen.



c. AKP (Justice and Development Party) Didirikan pada tahun 2001 sebagai partai pro-Islam yang dimotori oleh Mr. Erdogan dan Mr. Gul. AKP perlahan-lahan mendapatkan suara terbanyak di tiap pemilihan local maupun pemilihan umum, yang mengejutkan partai-partai lainnya. Pada 2002, mereka memenangkan 34,3 % suara dari total suara dan menjadi partai pemenang di pemilihan umum, dengan Abdullah Gul pertama sebagai Presiden, yang kemudian digantikan oleh Erdogan setelah sanksi politiknya dicabut. 3 koalisi partai lainnya tereliminasi. CHP pun muncul sebagai oposisi utama. Untuk pertama kalinya dalam beberapa decade ini, AKP berakhir sebagai partai tunggal di pemerintahan. AKP menolak label “Islamis” dan mendeklarasikan diri sebagai pendukung Barat dengan agenda social yang “conservative” namun juga teguh pada komitmen ekonomi pasar bebas serta keanggotaan Uni Eropa. Pada pemilu 2007, mereka mendapatkan 46,58 % suara dan total suara, dan memenangkan pemilu untuk kedua kalinya, menduduki 341 kursi parlemen. Pada pemilu 2011 mereka meningkatkan perolehan suaranya menjadi 49,91 % dan mendapat 327 kursi di parlemen, menguasai pemerintahan untuk ke-3 kalinya.

Dengan menguasai 60% hingga 70% kursi legislatif dalam 3 kali pemilu sejak tahun 2002, tentu saja AKP bisa mendominasi suara dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Selain itu, melihat latar social politik Turki, redefinisi AKP

tentu saja merupakan pencerminan pendekatan baru yang genial dalam

menghadapi tafsir tunggal Negara yang didominasi oleh militer. AKP berusaha mencari terobosan baru dalam memecah tembok tebal pandangan sekularisme otoritarian tersebut. Redefinisi AKP tentang sekularisme membawa dua pesan penting bahwa afiliasi dan praktik keagamaan merupakan hak personal yang tidak dapat diabaikan. Namun di sisi lain, AKP menerima sekularisme sebagai prasyarat keikutsertaannya dalam kancah politik Turki. AKP menegaskan kompatibilitas Islam dan demokrasi. AKP menawarkan relasi Islam dan sekularisme yang lebih ramah dan bersahabat, namun partai ini menolak interpretasi ekstrem sekularisme yang tidak ditemukan dalam praktik demokrasi.

Dalam tataran praksis, AKP tampaknya tidak hendak menguras energy gerakan dalam jebakan ranah interpretative apakah sekularisme dapat diterima Islam atau tidak. Erdogan lebih menyukai mengadopsi sekularisme dalam derajat yang dapat dipahami dalam konteks prinsip universalitas Islam, seperti menegakkan keadilan, menyingkirkan kezaliman dan perilaku diskriminatif, serta membangun consensus demi kemaslahatan bersama. Sekularisme dalam konteks ini adalah sikap Negara yang netral dan menjaga jarak dengan semua agama. Namun sekularisme tidak menegasikan peran agama sebagai sumber nilai dan inspirasi dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti pula bahwa moral dan prinsip agama dapat mempengaruhi kecenderungan keputusan dan kebijakan politik sehingga tidak membebaskan karakter seluruh lembaga lembaga politik yang

Satu hal menarik lainnya adalah proses pendekatan non-ideologis dan minus konflik kelompok Islamis mampu memoderasi kubu sekuler dalam pendekatan elektoralnya. CHP, partai politik terbesar ke-2 di parlemen, mulai melirik pemilih muslim tradisional. Partai ini tidak lagi bersikap terang-terangan anti Islam. Selain mengakomodasi tuntutan reformasi politik yang disuarakan oleh AKP, terutama pasca referendum, partai ini juga mulai menerima nilai dan symbol Islam dalam hierarki politik mereka. CHP membangun masjid di kantor pusatnya dan mengakomodasi para muslim berjilbab dalam struktur partai. Moderasi atau lebih tepatnya pragmatism ini merefleksikan akomodasi atas realitas struktur social masyarakat Turki yang religious demi kepentingan elektoralnya. Demikian pula, MHP, partai sekuler yang lebih ideologis. Partai ini mendukung amandemen pencabutan larangan berjilbab yang diajukan AKP tahun 2007.⁴⁵

C. Interest Influencer

Apabila anda ingin membaca keberhasilan AKP, maka cermatilahn gerakan Gullen. (salah satu sasaran 'Dokumen pemberantasan fundamentalisme yang berencana melakukan kudeta dan agenda al-mithroqoh ats-tsaqilah atau bilyuz'). Apabila anda ingin mengenal sosok guru spiritual Erdogan yang sesungguhnya, ini di mana ia berkomitmen dan konsisten menjalankan ajaran-ajarannya dan mengembangkan metodenya, maka anda perlu mengenal sosok Fathullah Gullen, yang merupakan bapak sosiologi umat Islam di Turki.

Muhammad Fathullah Gullen adalah pendiri dan pemimpin gerakan keagamaan Gulen. Sekarang ini, nama Gukn disandingkan dengan istilah Al-

⁴⁵ Ahmad Dakiri, op cit, hal. 101-102

Islam At-Turki AL-Mutanawwir atau Al-Mu'tadil (Islam Turki yang inovatif atau moderat). Bersama para pendukungnya, ia berusaha membangun gerakan keagamaan berbasis politik dan social modern yang mampu berlomba dengan modernitas dengan beragama, nasionalisme, toleran, dan demokratis. Gerakan ini menempatkan Islam, Nasionalisme, dan Demokrasi dalam satu wadah. Banyak kolumnis Barat yang menulis tentang Gulen dan melukiskannya sebagai pemimpin gerakan sosialisme Islam dan nasionalis yang tidak memusuhi Barat dan membangun masa depan Islam secara sosiologis di Timur Tengah.

Gerakan Muhammad Fethullah Gulen ini memiliki ratusan sekolah agama: 300 unit sekolah di dalam negeri Turki dan 200 lainnya di beberapa Negara di dunia, mulai dari Tanzania, Kenya, Uganda, China, Turkmenistan, Rusia, Maroko, Mesir, Filipina, Balkan dan Kaukasus.

Gerakan ini juga memiliki beberapa surat kabar, majalah, stasiun televise khusus, perusahaan-perusahaan khusus, kerajaan bisnis, dan lembaga-lembaga social. Aktivitas dan kegiatan gerakan ini tidak terbatas pada itu, namun juga merambah pada pembangunan pusat-pusat kebudayaan khusus di beberapa Negara besar di dunia, mengadakan beberapa pertemuan tahunan di Inggris, Uni Eropa, dan Amerika, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di dunia untuk mempelajari cara kerja gerakan ini, seberapa jauh pengaruhnya, dan cikal bakal budaya dan sosialnya.⁴⁶ Dengan adanya gerakan atau kelompok kepentingan berbasis kuat yang mempunyai afiliasi dengan Erdogan, maka tak

luar negeri Turki. Karena Fethullah Gulen juga mempunyai agenda untuk membangun peradaban Islam yang modern di Timur Tengah dan Kaukasus.

D. Mass Influencer

AKP sebagai partai yang menghadapi banyak tantangan dari kubu sekuler dan militer ternyata mempunyai strategi yang melibatkan opini public dalam pembuatan kebijakannya. Langkah dan kebijakan politik saksama Erdogan menjadi modalitas AKP berinteraksi dengan kubu sekuler dan militer. Kebijakan politik AKP banyak disandarkan pada aspirasi rakyat yang dibuktikan melalui hasil survey atau polling. AKP tampaknya sangat memerhatikan penggunaan metode ilmiah ini dalam menghitung derajat dukungan dan kemudian memformulasikan kebijakannya berdasarkan faktor tersebut. Saat dukungan public menguat, maka pada saat itu pula partai ini semakin bertekad menjalankan kebijakan dan maneuver politiknya. Namun jika dukungan public atau dalam kalkulasi politik riil dipandang tidak begitu menguntungkan, maka mereka tidak segan mundur. Mereka memahami bahwa dalam demokrasi, aspirasi rakyat akan menjadi tolok ukur dan standar kebijakan.

Ketika AKP berusaha mengajukan amandemen pencabutan larangan berjilbab di perguruan tinggi dan institusi public lainnya, AKP mengawalinya dengan melakukan survey dukungan dan opini public atas isu ini. Hasilnya dua per tiga responden mendukung amandemen tersebut, ini artinya hasil survey tersebut menjadi lampu hijau bagi AKP untuk meneruskan proposal amandemen di parlemen. Aspirasi rakyat dalam banyak hal menjadi legitimasi politik AKPP

bersikeras mencalonkan Abdullah Gul sebagai presiden menggantikan Ahmet Necdet Sezer yang telah habis masa jabatannya. Di tengah gelombang aksi protes dan ancaman kudeta, AKP ternyata berhasil membuktikan bahwa dukungand rakyat berada di belakangnya. Abdullah Gul ternyata terpilih sebagai presiden.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Dzakirin, op.cit, hal. 100-101.